

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi isu global yang dihadapi oleh berbagai negara, tidak terkecuali negara maju. Permasalahan ini lebih kompleks di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi.² Meskipun Indonesia tergabung dalam forum internasional G20 (*Group of Twenty*) sejak tahun 1999 dan diakui sebagai salah satu *emerging economy* dengan potensi ekonomi yang besar di kawasan Asia, status Indonesia hingga saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 lebih merepresentasikan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi agenda prioritas nasional.³

Negara-negara dengan tingkat pembangunan yang masih rendah, seperti yang ditandai oleh dominasi mata pencaharian tradisional, ketergantungan pada perekonomian luar negeri, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya rata-rata

² Novia Rahmawati, Panji Kusuma Prasetyanto, and Fitrah Sari Islami, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)," *Convergence: The Journal of Economic Development* 4, no. 1 (2022): 19–31.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "G20", dalam <https://www.kemenkeu.go.id/g20>, diakses pada 16 April 2025

tingkat pendidikan penduduk, serta minimnya kesempatan kerja, sering mengalami kesulitan dalam menurunkan angka kemiskinan.⁴ Permasalahan ini menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat.⁵ Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.⁶ Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk miskin pada bulan September 2024 sebesar 8,57 yang hanya mengalami tingkat penurunan 0,46 persen poin terhadap bulan Maret 2024.⁷ Persentase penduduk miskin sebesar 8,57 persen tersebut masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,5 persen.⁸ Realitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil dari keterkaitan antara kemiskinan di wilayah perdesaan dan kemiskinan di wilayah perkotaan.⁹ Selama ini, wilayah perdesaan memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, mengingat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan.¹⁰

⁴ Fatwa Anisa Jannah, Fani Kusumawati, dan Anggiani, “Sosial Budaya dan Ekonomi Negara Maju Dengan Negara Berkembang”, *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam*, 2023: 83-87.

⁵ El Adawiyah, “Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya” *Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1, April (2020): 43–50.

⁶ Alfath Rizanda Putra and Suharto Suharto, “Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 2 (2024): 143–148.

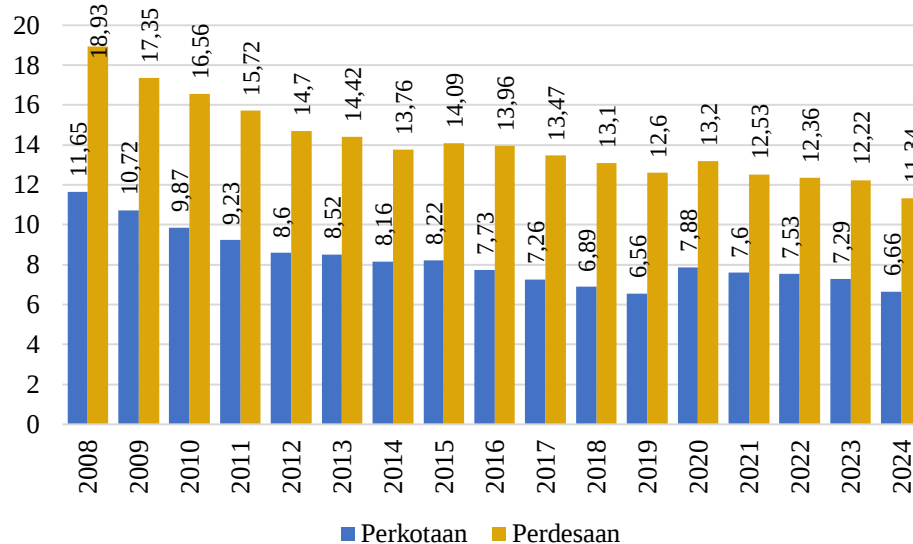
⁷ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.”, dalam <https://www.bps.go.id/id>, diakses 26 April 2025.

⁸ Wakil Presiden Republik Indonesia, “Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 persen di 2024, Wapres Minta K/L Terkait Optimalkan Program dan Anggaran”, dalam <https://www.wapresri.go.id/>, diakses pada 29 April 2025

⁹ Nur Imam Saifuloh and Nursini Nursini, “Dilema Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Sektor Pertanian,” *National Multidisciplinary Sciences* 1, no. 2 (2022): 102–108.

¹⁰ Riska Eka Agustina and Arya Yahya, “Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia,” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 6, no. 1 (2022): 98–108.

Grafik 1.1
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Tahun 2008 -2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik 1.1, terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok dalam tingkat kemiskinan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, yaitu rata-rata sebesar 5,87 persen dalam rentang waktu tujuh belas tahun mulai dari tahun 2008 hingga 2024. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta peluang kerja yang layak.¹¹ Ketimpangan ini mencerminkan masih terbatasnya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah, terutama di daerah perdesaan.

Permasalahan dalam pembangunan tidak terlepas dari kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi

¹¹ Muhammad Putra Hababil et al., “Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Antar Masyarakat”, *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1–9.

ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK).¹² Definisi lain dari kemiskinan adalah kondisi saat individu tidak memiliki cukup uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin kelangsungan hidup yang layak.¹³ Pemahaman mengenai kemiskinan itu tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar serta adanya perlakuan yang tidak setara bagi individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Secara umum, hak-hak dasar tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan, kesempatan bekerja, tempat tinggal yang layak, air bersih, kepemilikan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan dari ancaman atau tindakan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.¹⁴

Konsep lingkaran setan kemiskinan menggambarkan situasi yaitu negara-negara berkembang terjebak dalam siklus kemiskinan yang saling memperkuat dan sulit diputus. Menurut Ragnar Nurkse, istilah ini merujuk pada rangkaian kondisi yang saling berkaitan dan saling memengaruhi, yang secara

¹² Badan Pusat Statistik, “Penjelasan Data Kemiskinan”, dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>, diakses pada 16 April 2025

¹³ Jahtu Widya Ningrum et al., “Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 212–222.

¹⁴ Farathika Putri Utami, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh” *Jurnal Samudra Ekonomika* 4, no. 2 (2024): 101–113.

terus-menerus mempertahankan suatu negara dalam keadaan miskin. Misalnya, individu yang mengalami kemiskinan cenderung mengalami kekurangan gizi. Akibatnya, kondisi kesehatan menjadi buruk, yang kemudian menurunkan kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang rendah berdampak pada rendahnya pendapatan, yang pada akhirnya memperkuat kondisi miskin tersebut. Siklus ini akan terus berulang tanpa intervensi yang efektif.¹⁵

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan paling pesat di Indonesia dan menjadi pusat utama aktivitas perekonomian nasional. Keunggulan ini ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang terampil, pertumbuhan pasar domestik yang signifikan, serta infrastruktur yang relatif lengkap.¹⁶ Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu mencapai 12,62 juta jiwa atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin secara nasional. Keadaan ini bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya persentase kemiskinan di Pulau Jawa, melainkan karena jumlah penduduk di Pulau Jawa merupakan yang terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia.¹⁷

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Pulau Jawa disebabkan oleh tingginya angka kelahiran serta meningkatnya arus migrasi dari wilayah lain, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk setiap

¹⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 33-34.

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa”, dalam <http://appejawa.navperencanaan.com/whypromotion/viewjawa>, diakses pada 20 April 2025

¹⁷ Uyu Septiyati Liman, “BPS sebut 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4585642/bps-sebut-5245-persen-penduduk-miskin-terkonsentrasi-di-pulau-jawa>, diakses pada 20 April 2025

tahunnya.¹⁸ Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk per satuan luas wilayah, biasanya dinyatakan dalam jumlah jiwa per kilometer persegi (km²). Indikator ini mencerminkan tingkat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, sehingga dapat digunakan untuk menilai beban wilayah terhadap jumlah penduduk yang menempatnya.¹⁹ Tingginya tingkat kepadatan penduduk berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Salah satu dampak dari kepadatan penduduk yang tidak terkendali adalah meningkatnya angka kemiskinan. Keterbatasan lahan, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perumahan, menjadi faktor yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.²⁰

Hal ini selaras dengan pandangan Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas produksi pangan atau sumber daya yang tersedia. Menurut Malthus, penduduk bertambah secara geometris, sementara sumber daya tumbuh secara aritmetis, sehingga jika tidak ada upaya pengendalian, maka kelangkaan dan kemiskinan akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Lebih lanjut, Malthus menekankan bahwa kemiskinan dapat

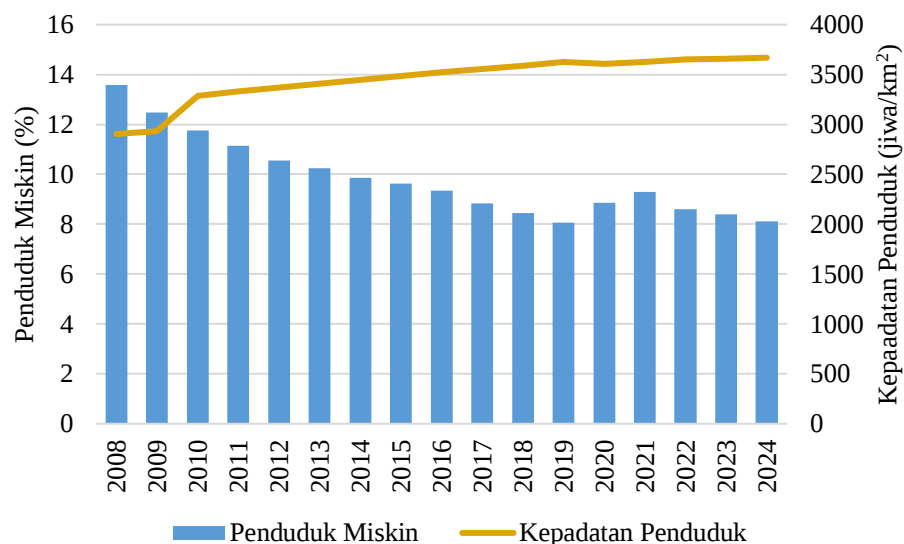
¹⁸ Julia Armita Parenja, Miftah Az-zura Salsabila, Fatmawati, "Dampak Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa terhadap Kesejahteraan dan Kriminalitas", *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 4328-4337.

¹⁹ Gratiningsih dan Eko Sutrisno, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hlm. 25.

²⁰ Arif, A. F. N., & Nurwati, N., "Pengaruh konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa terhadap kesejahteraan masyarakat", *Jurnal Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial* 4, No. 1 (2019): 45-58.

menjadi dorongan alami bagi individu untuk mengendalikan kelahiran. Apabila tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya berada pada masing-masing individu, maka keputusan untuk menikah dan memiliki keturunan akan dilakukan dengan lebih hati-hati dan rasional. Dalam hal ini, pengendalian jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa.²¹

Grafik 1.2
Persentase Penduduk Miskin dan Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa
Tahun 2008 -2024 (Jiwa/km²)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2008 hingga tahun 2024. Pada tahun 2008, kepadatan penduduk tercatat sebesar 2.904 jiwa/km² dan terus meningkat hingga mencapai 3.669 jiwa/km² pada tahun 2024.

²¹ Kemdiktisaintek, “Teori Penduduk”, dalam <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2025.

Peningkatan ini mencerminkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terjadi di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa merupakan pusat utama aktivitas perekonomian nasional.²² Sementara itu, tingkat kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan dari 13,59 persen pada tahun 2008 menjadi 8,12 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*. Sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sebesar 56,84 persen pada triwulan III tahun 2024, Pulau Jawa tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tingginya kepadatan penduduk juga menjadikan tantangan tersendiri, salah satunya adalah persoalan kemiskinan yang masih menjadi isu krusial meskipun secara umum telah mengalami penurunan.²³

Kepadatan penduduk memiliki potensi positif apabila dikelola secara efektif. Penduduk yang padat dapat menjadi sumber daya manusia produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan peluang usaha, serta iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, dampak negatif kepadatan terhadap kemiskinan dapat ditekan dan justru menjadi modal dalam percepatan pembangunan.²⁴ Hal ini sesuai dengan teori modal manusia (*human capital*) yang dikemukakan oleh

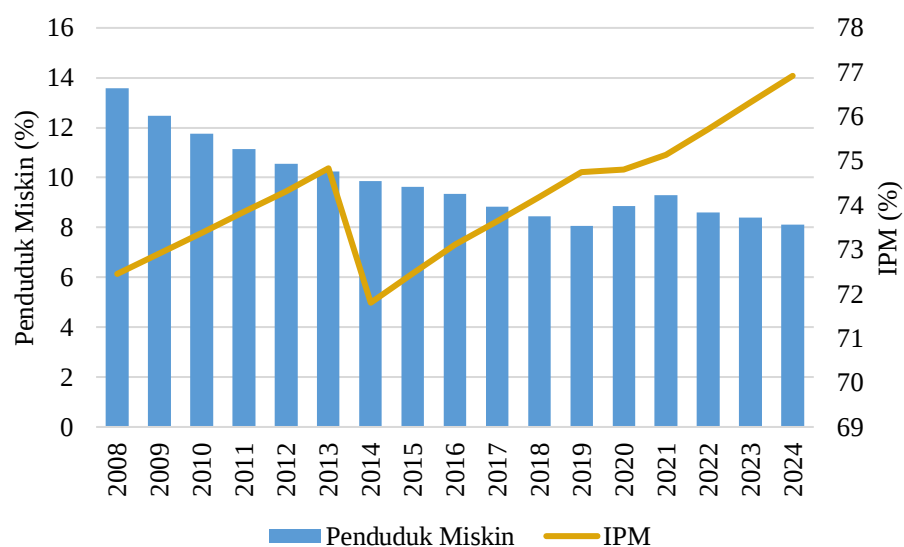
²² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa”, dalam <http://appejawa.navperencanaan.com/whypromotion/viewjawa>, diakses pada 20 April 2025

²³ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024 Tumbuh 1,50 Persen (Q-to-Q)”, dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2382/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2024-tumbuh-1-50-persen--q-to-q-.html>, diakses pada 17 April 2025

²⁴ Comellia Yulin Esther Dita dan Martinus Legowo, “Analisis Kepadatan Penduduk yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, No. 01 (2022): 1-12.

Gary S. Becker, bahwa pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi yang paling penting dalam pengembangan modal manusia untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.²⁵ Ketiga aspek tersebut tercermin dalam indikator indeks pembangunan manusia (IPM), yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.²⁶ Oleh karena itu, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), menjadi salah satu kunci strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.²⁷

Grafik 1.3
Persentase Penduduk Miskin dan IPM di Pulau Jawa
Tahun 2008 -2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

²⁵ Priyono dan Zaenudin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Jawa Tengah: Dharma Ilmu, 2012), hlm. 199.

²⁶ United Nations Development Programme, “Human Development Reports”, dalam <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>, diakses pada 21 Juni 2025.

²⁷ Anis Salsabila,dkk., “Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia”, *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 4, No. 1 (2025): 192-208.

Berdasarkan grafik 1.3, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2008 hingga 2024. Pada tahun 2008, indeks pembangunan manusia (IPM) berada di angka 72,45 dan terus meningkat hingga mencapai 76,91 pada tahun 2024. Kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) ini menunjukkan adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Sementara itu, tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang menurun secara umum dari 13,59 persen pada tahun 2008 menjadi 8,12 persen pada tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*, tren penurunan kembali berlanjut setelahnya. Pola ini mencerminkan hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan, yaitu peningkatan kualitas pembangunan manusia secara umum disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa selama periode 2008 hingga 2024.²⁸

Sebagai wilayah dengan populasi terbanyak di Indonesia, kompetisi dalam memasuki pasar kerja di Pulau Jawa menjadi semakin intens. Kondisi ini secara khusus memengaruhi kelompok usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan dan mulai mencari pekerjaan, tapi sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki.²⁹ Ketika seseorang berada dalam kondisi

²⁸ Sitti Rachma Ramadhani Maskur, dkk., “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 8, Nomor 1 (2023): 82-95.

²⁹ Wilda Aulia Anandita Putri and Arfida Boedirochminarni, “Dinamika Pengangguran Terbuka Di Provinsi Pulau Jawa: Analisis Data Panel” *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)* 3, no. 2 (2025): 1–7.

menganggur, maka pendapatannya akan menurun atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tingkat kemakmuran yang diharapkan menjadi sulit tercapai. Jika situasi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka akan berdampak pada penurunan daya beli, ketidakstabilan sosial, dan pada akhirnya meningkatkan risiko kemiskinan.³⁰ Oleh karena itu, pengangguran merupakan salah satu faktor penting yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah dengan populasi besar seperti Pulau Jawa.³¹

Pengangguran (*unemployment*), mencakup individu yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha baru, merasa putus asa karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.³² Kondisi ini dapat terjadi karena individu tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Di banyak negara berkembang, rendahnya kompetensi ini sering kali berakar dari kualitas pendidikan yang belum optimal. Akibatnya, peluang kerja justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah bahkan luar negeri. Jika tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka solusi yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, baik melalui jalur formal maupun

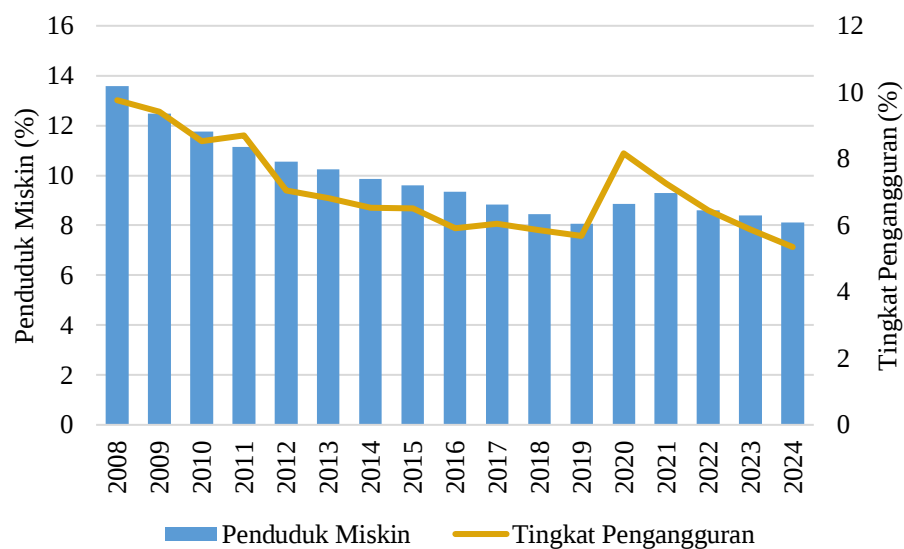
³⁰ Anggi Irma Lismanaa and Hadi Sumarsono, "Analysis of the Effect of Population Growth, Human Development Index and Unemployment Rate on Poverty in West Java Province 2017-2020", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 20, no. 01 (2022): 88–97.

³¹ Dini Anggraini et al, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" *Tirtayasa EKONOMIKA* 18, no. 1 (2023): 123–138.

³² Badan Pusat Statistik, *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional*, hlm. 3.

nonformal.³³ Hal ini sesuai dengan teori modal manusia (*human capital*) oleh Gary S. Becker, yang menyatakan bahwa investasi dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi utama untuk meningkatkan kapasitas individu dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.³⁴

Grafik 1.4
Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa
Tahun 2008 -2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.4, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Pulau Jawa mengalami tren penurunan dari tahun 2008 hingga 2019, yaitu dari 9,76 persen pada tahun 2008 menjadi 5,69 persen pada tahun 2019. Namun, terjadi lonjakan pada tahun 2020 menjadi 8,16 persen. Hal ini terjadi seiring dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penurunan jumlah lowongan pekerjaan sebagaimana dicatat oleh

³³ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 222-223.

³⁴ Priyono dan Zaenudin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Jawa Tengah: Dharma Ilmu, 2012), hlm. 199.

Kementerian Ketenagakerjaan (2021) dan Badan Pusat Statistik (2020), menunjukkan bahwa menurunnya iklan lowongan pekerjaan selama Maret hingga Agustus 2020, yang turut mempersempit peluang kerja sehingga menyebabkan lonjakan pengangguran di Pulau Jawa.³⁵ Setelah itu, tingkat pengangguran kembali menurun secara bertahap hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, yakni dari 13,59 persen pada tahun 2008 menjadi 8,12 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang searah antara menurunnya tingkat pengangguran dan berkurangnya angka kemiskinan.³⁶

Selanjutnya, faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah kesempatan kerja. Hubungan antara kesempatan kerja dan kemiskinan terlihat dari dampak pengangguran yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Kondisi ini mendorong peningkatan risiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan.³⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, kesempatan kerja didefinisikan sebagai lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja maupun pekerja yang telah ada.³⁸ Jumlah kesempatan kerja sangat dipengaruhi

³⁵ Meilani Thereza Br. Saragih and Hardius Usman, "Analisis Pengangguran Usia Muda Di Pulau Jawa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Studi Pemuda* 10, no. 2 (2021): 99–114 .

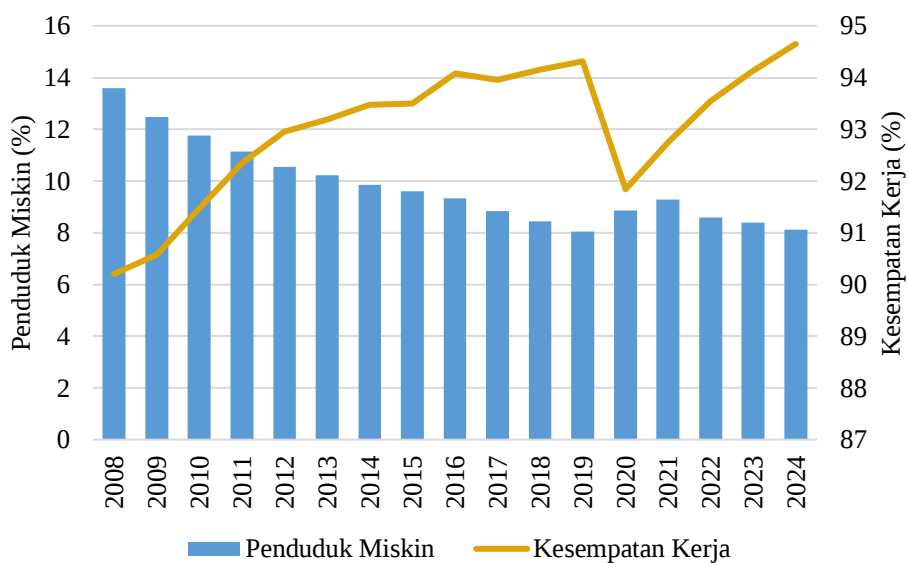
³⁶ Melva Rivana dan Irwan Gani, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan", *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 20, No. 1 (2024): 51-60.

³⁷ Nurainah, "Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan", *IEP : Jurnal Ilmu EKonomi Dan Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 63–75.

³⁸ Peraturan-Pemerintah-Nomor-33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, dalam <https://disnakerwonogiri.id/>, diakses pada 21 April 2025.

oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan *output*, tingkat upah, serta harga-harga dari faktor produksi lainnya. Hubungan antara pertumbuhan *output* dan peningkatan kesempatan kerja dapat dilihat melalui keterkaitan antara pasar barang dan pasar tenaga kerja. Dalam mekanisme pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan tenaga atau jasanya dan memperoleh imbalan berupa gaji. Ketika permintaan konsumsi rumah tangga meningkat di pasar barang, hal ini mendorong peningkatan *output*. Apabila peningkatan *output* terjadi di berbagai sektor, maka secara agregat akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja.³⁹

Grafik 1.5
Persentase Penduduk Miskin dan Kesempatan Kerja di Pulau Jawa
Tahun 2008 -2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.5, dapat dilihat bahwa kesempatan kerja di Pulau Jawa mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, terutama pada

³⁹ Peraturan-Pemerintah-Nomor-33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, dalam <https://disnakerwonogiri.id/>, diakses pada 21 April 2025.

periode 2008 hingga 2019 yang menunjukkan tren naik dari 90,21 persen menjadi 94,31 persen. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020 hingga 2021 akibat dampak pandemi *Covid-19*, angka kesempatan kerja kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 94,66 persen pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, dari 13,59 persen pada tahun 2008 menjadi 8,12 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan hubungan negatif antar kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan, mengingat semakin banyak penduduk yang memperoleh pekerjaan akan menurunkan kemiskinan.⁴⁰

Selain itu, upah juga diduga menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut teori upah efisiensi, pemberian upah yang lebih tinggi dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja.⁴¹ Dalam peraturan terbaru, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, upah minimum didefinisikan sebagai jumlah upah bulanan paling rendah yang berlaku di suatu perusahaan dan ditetapkan oleh gubernur.⁴² Keberadaan upah minimum ini menjadi salah satu wujud perlindungan dari pemerintah kepada tenaga kerja, sekaligus menjadi acuan bagi pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada karyawan di lingkungan usahanya. Dengan demikian, kebijakan

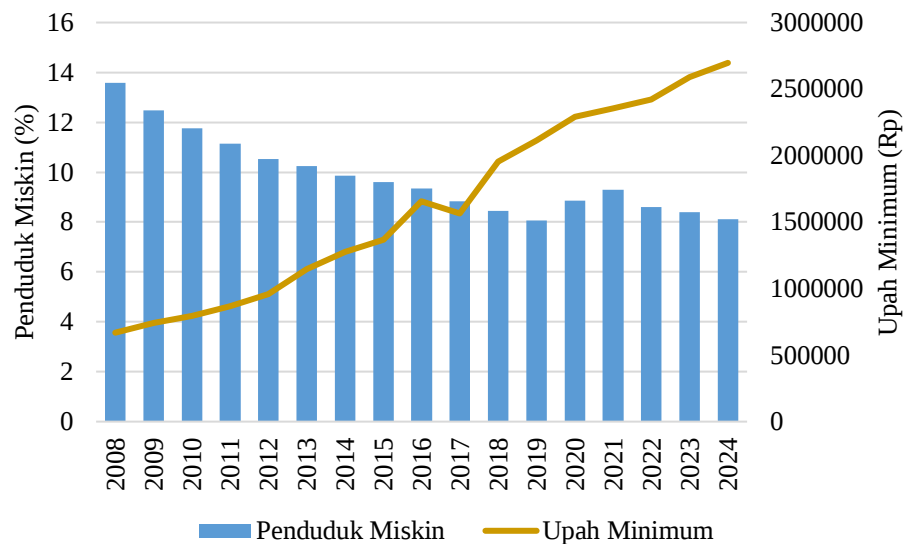
⁴⁰ Muhamad Iksan dan Sudarsana Arka, “Pengaruh Upah, Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Serta Kemiskinan Provinsi Jabar Bagian Selatan”, *E-Jurnal EP Unud*, 11[01] : 147-175.

⁴¹ Jemila Rahmi dan Riyanto, “Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja : Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia (*The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity : Evidence from Indonesian Manufacturing Industry*)” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 1–12.

⁴² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 21 April 2025.

upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan.⁴³

Grafik 1.6
Persentase Penduduk Miskin dan Upah Minimum di Pulau Jawa
Tahun 2008 -2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.5, selama periode 2008 hingga 2024, seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tren kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memiliki nilai upah minimum tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu Rp972.604,00 tahun 2008 hingga Rp5.067.381,00 tahun 2024, diikuti oleh Banten (Rp837.000,00 hingga Rp2.727.812,11), Jawa Barat (Rp568.193,00 hingga Rp2.057.495,00), Jawa Tengah (Rp547.000,00 hingga Rp2.036.947,00), Jawa Timur (Rp500.000,00 hingga Rp2.165.244,30) dan DI Yogyakarta (Rp586.000,00 hingga Rp2.125.897,61). Di sisi lain, upah minimum terendah secara umum tercatat di

⁴³ Endeh Suhartini, et al, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 49–50.

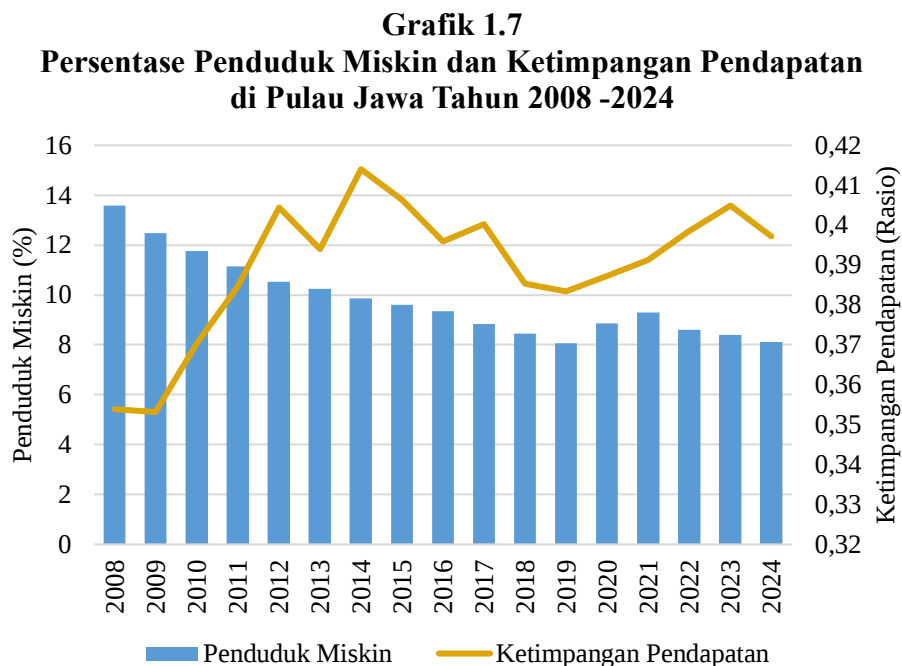
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kenaikan upah minimum ini umumnya disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi, meskipun tidak selalu terjadi secara linier setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, yakni ketika upah minimum meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan.⁴⁴

Selanjutnya, indikator yang diduga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan.⁴⁵ Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan perbedaan distribusi kekayaan antar individu atau rumah tangga, yang dipengaruhi oleh tingkat pembangunan, keragaman etnis, serta keberhasilan tata kelola pemerintahan. Simon Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada awal pertumbuhan ekonomi tapi akan menurun seiring dengan meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan.⁴⁶

⁴⁴ Siti Hanifah and Nurul Hanifa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan” *INDEPENDENT : Journal Of Economics* 1, 3 (2021): 191–206.

⁴⁵ Sitti Rachma Ramadhani Maskur, dkk., “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dn Pembangunan Manusiaterhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 8, Nomor 1 (2023): 82-95.

⁴⁶ Evanty Caesarisma and Hamrullah, “Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Barat 2017-2021” *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial* 2, no. 2 (2023): 81–98.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.7, dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa mengalami fluktuasi selama periode 2008 hingga 2024. Ketimpangan pendapatan meningkat dari 0,3538 pada tahun 2008 hingga mencapai puncaknya sebesar 0,414 pada tahun 2014, kemudian cenderung menurun hingga 2019, tapi kembali naik saat pandemi *Covid-19* sebelum akhirnya sedikit menurun menjadi 0,3971 pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan dari 13,59 persen pada tahun 2008 menjadi 8,06 persen pada tahun 2019. Meskipun sempat meningkat akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021, jumlah penduduk miskin kembali menurun hingga mencapai 8,12 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan karena belum menunjukkan pola penurunan yang konsisten.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Kepadatan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Pulau Jawa Tahun 2008-2024”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah penelitian supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008 – 2024. Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas perekonomian nasional, data menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menyumbang angka kemiskinan terbesar secara nasional, yaitu sebesar 12,62 juta jiwa atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin Indonesia. Tingginya angka kemiskinan tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap individu maupun kelompok

dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya kepadatan penduduk, pembangunan manusia yang kurang merata, tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat upah minimum, serta distribusi pendapatan yang belum merata. Oleh karena itu, keenam variabel tersebut diduga memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

2. Batasan Penelitian

Keterbatasan penelitian merujuk pada kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari serta memengaruhi pelaksanaan dan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada ketersediaan data, karena data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Satu Data Ketenagakerjaan. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan pada enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi selama tujuh belas tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2024, karena pada periode tersebut data tersedia secara lebih

lengkap, konsisten, dan relevan, serta mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan proses penyusunan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang secara jelas dan tegas menggambarkan hal-hal yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah terdapat pengaruh antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?
5. Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?
6. Apakah terdapat pengaruh antara ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, yang dirumuskan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.
6. Untuk mengetahui pengaruh antara ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam jangka pendek dan jangka panjang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan dan kebijakan sosial. Dengan mengkaji pengaruh kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami dinamika kemiskinan. Fokus penelitian ini mencerminkan pentingnya peran ilmu ekonomi dalam merespons isu kemiskinan sebagai persoalan struktural yang memerlukan pendekatan berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Tempat Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, serta diskusi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan topik penelitian yang relevan, baik dari segi teori, metode analisis, maupun cakupan wilayah yang lebih luas.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan landasan awal bagi penelitian lanjutan dengan ruang lingkup dan pendekatan yang lebih luas. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan rentang waktu yang lebih panjang hingga tiga puluh tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan representatif. Kemudian menambahkan variabel lain yang relevan, seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, serta mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang berbeda, seperti menggunakan analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dan regresi data panel agar dapat memberikan perspektif baru terhadap hubungan antar variabel yang diteliti.

c. Bagi Pemerintah

Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup upaya pengendalian kepadatan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan tingkat pengangguran, penciptaan lapangan kerja formal, penyesuaian kebijakan upah minimum yang responsif terhadap kondisi pasar tenaga kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan di berbagai lapisan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, temuan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan, seperti kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran, upah minimum, dan ketimpangan pendapatan. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan terdorong untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta lebih aktif memanfaatkan program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, kesadaran akan pentingnya peran individu dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup variabel, sub-variabel, dan indikator yang akan diteliti, serta menjelaskan populasi, subjek, dan lokasi penelitian, sehingga dapat dipahami batasan pembahasan dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada enam provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu selama tujuh belas tahun, yaitu pada periode 2008 – 2024. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh variabel, yaitu enam variabel eksogen (independent) yang meliputi kepadatan penduduk (X1),

indeks pembangunan manusia (X2), tingkat pengangguran (X3), kesempatan kerja (X4), upah minimum (X5), dan ketimpangan pendapatan (X6). Serta satu variabel endogen (dependen), yaitu kemiskinan (Y)

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai suatu istilah atau variabel yang merujuk pada makna teoritis berdasarkan sumber dari kamus, buku, atau literatur ilmiah yang sesuai dengan bidang kajian penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kepadatan Penduduk (X1)

Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Kepadatan penduduk menggambarkan seberapa banyak penduduk yang mendiami setiap kilometer persegi (km²) di suatu wilayah, sehingga dapat mencerminkan tingkat konsentrasi penduduk di wilayah tersebut.⁴⁷

b. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian rata-rata dalam tiga aspek utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak. Indeks pembangunan

⁴⁷ Gratiningsih dan Eko Sutrisno, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hlm. 25.

manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometrik dari masing-masing indeks dimensi yang telah dinormalisasi.⁴⁸

c. Tingkat Pengangguran (X3)

Pengangguran (*unemployment*) mencakup individu yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha baru, merasa putus asa karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.⁴⁹ Pengangguran terjadi ketika tenaga kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, yang mencerminkan terbatasnya akses ke kesempatan kerja yang layak. Pengangguran juga mencakup mereka yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak memenuhi kriteria tertentu, yang dilihat dari tiga dimensi: waktu kerja, intensitas pekerjaan, dan produktivitas.⁵⁰

d. Kesempatan Kerja (X4)

Kesempatan kerja didefinisikan sebagai lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja maupun pekerja yang telah ada.⁵¹ Dalam definisi lain, kesempatan kerja merujuk pada jumlah posisi atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja, yaitu individu

⁴⁸ United Nations Development Programme, “Human Development Reports”, dalam <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>, diakses pada 21 Juni 2025.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional*, hlm. 3.

⁵⁰ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 220.

⁵¹ Peraturan-Pemerintah-Nomor-33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, dalam <https://disnakerwonogiri.id/>, diakses pada 21 April 2025.

berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan dalam suatu periode tertentu.⁵²

e. Upah Minimum (X5)

Upah minimum merupakan jumlah upah bulanan paling rendah yang berlaku di suatu perusahaan dan ditetapkan oleh gubernur.⁵³ Keberadaan upah minimum ini menjadi salah satu wujud perlindungan dari pemerintah kepada tenaga kerja, sekaligus menjadi acuan bagi pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada karyawan di lingkungan usahanya.⁵⁴

f. Ketimpangan Pendapatan (X6)

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan menggambarkan adanya perbedaan pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor.⁵⁵ Faktor-faktor ketimpangan pendapatan mencakup ketidakmerataan akses terhadap peluang kerja, perbedaan tingkat upah, subsidi yang diterima, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, dan teknologi.⁵⁶

⁵² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 206.

⁵³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 21 April 2025.

⁵⁴ Endeh Suhartini, et al, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 49–50.

⁵⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965 – 2018*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 127

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 127

g. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK).⁵⁷ Sementara itu, definisi lain menyatakan kemiskinan adalah kondisi saat individu tidak memiliki cukup uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin kelangsungan hidup yang layak.⁵⁸

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjabaran suatu variabel ke dalam bentuk yang bersifat praktis dan terukur, yang menunjukkan bagaimana variabel tersebut diaplikasikan dan diobservasi secara nyata dalam ruang lingkup objek penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kepadatan Penduduk (X1)

Kepadatan penduduk diukur dengan menggunakan indikator kepadatan penduduk per provinsi. Kepadatan penduduk tidak hanya menggambarkan jumlah penduduk per satuan luas, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah, perencanaan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, “Penjelasan Data Kemiskinan”, dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>, diakses pada 16 April 2025

⁵⁸ Jahtu Widya Ningrum et al., “Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 212–222.

tata ruang, serta potensi dampak sosial dan ekonomi. Data kepadatan penduduk diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

b. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan tiga komponen utama, yaitu komponen kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, komponen pengetahuan yang dinilai dari gabungan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen standar hidup layak yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menggunakan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* dalam satuan rupiah. Data indeks pembangunan manusia diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

c. Tingkat Pengangguran (X3)

Pengangguran diukur menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data tingkat pengangguran diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

d. Kesempatan Kerja (X4)

Kesempatan kerja diukur dengan menggunakan indikator tingkat kesempatan kerja, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Variabel kesempatan kerja mengukur seberapa besar peluang individu untuk

memperoleh pekerjaan yang layak di pasar tenaga kerja. Data kesempatan kerja diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

e. Upah Minimum (X5)

Upah minimum diukur dengan menggunakan indikator upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun. Variabel upah minimum menunjukkan tingkat pendapatan terendah yang harus diterima oleh pekerja yang bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data upah minimum dapat diperoleh dari laporan Satu Data Ketenagakerjaan pada tingkat provinsi.

f. Ketimpangan Pendapatan (X6)

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan indikator rasio gini, yang menggambarkan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Nilai rasio gini antara 0 (kesetaraan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna) menunjukkan seberapa merata atau tidak meratanya pendapatan di suatu daerah. Data rasio gini dapat diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

g. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan diukur dengan menggunakan indikator garis kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran per kapita yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan. Variabel kemiskinan diukur dengan persentase jumlah penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan menulis laporan penelitian yang dilakukan, kemudian dijadikan beberapa bab, yaitu:

1. Bagian awal terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri atas beberapa bagian, yaitu:
 - a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang singkat. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

- b. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan telaah pustaka terkait tentang definisi judul penelitian. Bab ini berisi teori-teori yang membahas variabel/sub variabel, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

- c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling dan

sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan paparan data yang sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah atau hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan temuan penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya.

f. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang menjawab atas pokok permasalahan dan saran peneliti mengenai penelitian.

3. Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.